

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil simpulan antara lain :

1. Pertimbangan Hakim dalam perkara PTUN Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG terhadap penyelesaian sengketa pebebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat adalah :
 - a. Hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti dari Tergugat tidak relevan.
 - b. Dari aspek prosedur telah terbukti penerbitan objek sengketa ini cacat yuridis
 - c. Berdasarkan pertimbangan hukum maka terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan untuk sebagian.
2. Konsekuensi Hukum Dalam Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat Dalam Perkara PTUN Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG, antara lain :
 - a. Nofdinal Yefri di mutasi jabatan yang sudah ditetapkan keputusan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/51/BUP-PASBAR/2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan posisi jabatan atau tempat tugas lama : Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat ke jabatan atau

tempat tugas baru : Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

- b. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim pada Perkara Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Agar Bupati Pasaman Barat sebagai Kepala Daerah melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam aturan hukum seperti Peraturan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik.
- b. Agar Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas dengan transparan sesuai SOP yang berlaku dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali Achmad, 2003, *Seri Hukum Pertahanan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertahanan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Anggara, 2016, *Administrasi Kepegawaian Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Bambang, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok
- Bernard L Tanya, 2011, *Penegak Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta
- Kaloh, 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Laura Nader dalam Sofian, 2015, *Perbedaan Konflik dan Sengketa*, Pustaka Media, Jakarta
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moeljarto, 2004, *Birokrasi Dalam Polemik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Liberty, Yogyakarta
- Rosdakarya, 2007, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- R. Wiyono, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sarjita, 2005, *Strategi Penyelesaian Sengketa Pertahanan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta
- Soerjono, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sri Hartini, dkk, 2020, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Sudikno, 2011, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Suyud, 2000, *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase*, Ghalia Inonesia, Jakarta

W. Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional.

Putusan PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG.

C. SUMBER LAIN

Abdul Rahman, Riani Bakri, Penataan Pengelola, Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance, *Jurnal Konstituen*, Vol.1, No.2

Agustian Yusuf, Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik, *E-Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 11

Ahmad, “Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2

- Ajib, Analisis Model Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Di Badan Kepegawaian Negara, *Jurnal Civil Service*, Vol. 10, No. 1
- Anggita Doramia, Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2, No.4
- Bkd.sumbarprov, Tugas Pokok Dan Fungsi, <https://bkd.sumbarprov.go.id/web>, 26 Oktober 2023
- Citra, Fifi, “Penyetaraan Pola Karier Pasca Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional”, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 11, No.2
- Detikedu, Peradilan Tata Usaha Negara: Pengertian, Tugas dan Fungsinya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5633283/peradilan-tata-usaha-negara-pengertian-tugas-dan-fungsinya>, 26 Oktober 2023
- Fahmi Aulia, Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional : Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, *Jurnal Aparatur*, Vol. 4, No. 2
- Gede, dkk, “Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1
- Hendrik Salmon, 2020 Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 4
- Jfteori.com, 25 Oktober 2023, Pengertian Jabatan Fungsional, <https://www.jfteori.com/2021/01/jabatan-fungsional.html>
- Jojonomic, Kenapa Sih Masyarakat Banyak Tertarik Jadi PNS (ASN)?, <https://www.jojonomic.com/blog/kenapa-sih-masyarakat-banyak-tertarik-jadi-pns-asn/>, 22 Oktober 2023
- Kamil Akbar, Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Dharmasisya*, Vol.1, No.1
- Kompas.com, Sengketa: Pengertian, Penyebab dan Penyelesaian, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/26/090000469/sengketa--pengertian-penyebab-dan-penyelesaiannya?page=all>, 23 Oktober 2023

Nurnaningsih dalam Yani, 2020, Penyelesaian Sengketa Di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3

Maria, Transformasi Jabatan Untuk Mewujudkan Generasi Emas ASN: Jabatan Fungsional, *Jurnal Widya Praja*, Vol. 2 No. 1

Raja Ariza, “Penguatan Fungsi Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Studi Kasus Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, Vol. 9, No.2

Richard L. Abel dalam Yani, Penyelesaian Sengketa Di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3

Rosmaini, Hasrudy, Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai, *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, Vol. 2, No. 1

Satria Koraag, Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 7

Winardi dalam Yani, Penyelesaian Sengketa Di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3

Yani, Penyelesaian Sengketa Di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3